

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DIPA DITJEN BIMAS KRISTEN PADA KANTOR
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN ENDE**

Oleh

1) Yohana Audivista Lomi

Mahasiswa Program Studi Akuntansi

e-mail: yoanlomy08@gmail.com

2) Yulita Londa

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: yulitalonda00@gmail.com

3) Sabra B. Wahab Thalib

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: sabrawahabthalib@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was conducted to determine the application of accrual-based government accounting standards in the presentation of financial reports at the Ministry of Religion Office of Ende Regency, especially in DIPA DITJEN BIMAS KRISTEN.

The method in this research uses descriptive qualitative research, to determine the application of accrual-based government accounting in the Ministry of Religion Office of Ende Regency, especially in DIPA DITJEN Bimas Kristen. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation.

From the results of the research conducted, in the DIPA DITJEN Bimas Kristen Office of the Ministry of Religion, Ende Regency, it is known that accrual-based government accounting standards have been understood in theory but to implement them in the field is still very complex because it requires Human Resources who really understand how SAP works itself.

Keywords: *Accrual-Based Government Accounting Standards*

1. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Ende.

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP(2006:3) adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Laporan keuangan DIPA DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende pada Tahun anggaran 2013, 2014, 2015 terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. realitas yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende masih ada penundaan pencatatan transaksi. Sedangkan menurut sistem akrual, semua transaksi harus dicatat pada saat terjadi transaksi tersebut. dengan adanya penundaan pencatatan transaksi pada periode yang sedang berjalan, maka sangat berdampak pada sistem laporan keuangan pada akhir periode karena laporan yang dihasilkan bersifat tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya, selain itu pengaruh keterlambatan penyusunan sistem laporan keuangan berbasis akrual adalah Sumber daya manusia.

Rencana pemecahan masalah bagaimanakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende khususnya pada DIPA DITJEN Bimas Kristen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende khususnya pada DIPA DITJEN Bimas Kristen.

2. Kajian Pustaka

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966).

2.2 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

2.3 Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintah

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.5 Perkembangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*.

2.6 Basis Akuntansi Pemerintah

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.7 Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun."Syukriy (2008).

2.8 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual

Kieso dkk (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang telah dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual.

2.9 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah.

2.10 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut, "Hasibuan (2000:3),

2.11 Transaksi DIPA dan Revisi DIPA

Salah satu ciri dari kemandirian entitas adalah unit tersebut memiliki dokumen anggaran sendiri. Dokumen anggaran pada satuan kerja biasa disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/Petikan DIPA).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende khususnya DIPA DITJEN Bimas Kristen. Metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) secara penuh mulai tahun 2015. Secara konsep pengelolaan keuangan di DIPA DITJEN BIMAS Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, mereka sudah mengetahui definisi dari basis akrual itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf penyelenggara BIMAS Kristen mengatakan bahwa secara spesifik berbasis akrual

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIPA DITJEN BIMAS KRISTEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDED - YOHANA AUDIVISTA LOMI, YULITA LONDA, SABRA B. WAHAB THALIB

mencatat transaksi keuangan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat transaksi keuangan dilakukan sehingga dapat mengetahui berapa besar transaksi tersebut dapat mempengaruhi pendapatan biaya maupun beban yang benar-benar terjadi pada periode laporan tertentu. Sedangkan penerapan SAP yang dilakukan dalam penyajian laporan keuangan DIPA DITJEN BIMAS Kristen Kantor Kementerian Agama mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010, Dimana dalam laporan keuangan tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Berdasarkan pandangan staf diatas telah sesuai dengan makna berbasis akrual seperti yang telah disimpulkan KSAP (2006:3) yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. oleh sebab itu dari pandangan staf diatas terhadap pengertian berbasis akrual dapat dikatakan bahwa rata-rata pengelola keuangan pemerintahan DIPA DITJEN BIMAS Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende telah menyadari adanya pergantian Standar Akuntansi Pemerintah yang saat ini berlaku, namun dalam melaksanakan secara utuh masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi syarat karena implementasi mereka belum mampu menerapkan secara keseluruhan tentang apa yang telah mereka pahami tersebut.

Informasi yang diperoleh peneliti, bahwa pemahaman mengenai implementasi basis akrual DIPA DITJEN BIMAS Krsiten Kantor Kementerian Agama belum memadai, karena semenjak tahun anggaran 2015 DIPA DITJEN Bimas Kristen sudah menggunakan basis akuntansi akrual, namun pelatihan baru diikuti sebanyak 2 (dua) kali. laporan keuangan yang dihasilkan lebih merujuk pada kenyataan rill dalam menentukan besarnya transaksi keuangan yang akan mempengaruhi laporan keuangan. Dalam pencatatan berbasis akrual kita harus dapat mengetahui beban yang benar-benar terjadi pada periode tertentu, beban yang masih harus dibayar pada periode berikutnya, pendapatan yang benar terjadi maupun pendapatan yang masih harus ditagihkan pada periode berikutnya. mengenai komitmen semua pemerintah atau kementerian atau lembaga harus tunduk pada Peraturan Nomor 71 Tahun 2010. Secara otomatis semua kuasa pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen wajib mengarahkan

bendahara maupun para pengelola keuangan harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini PP Nomor 71 Tahun 2010.

Hasil penelitian di atas, jelas memandang basis akrual dalam pemerintahan khususnya pada DIPA BIMAS Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende sebagai suatu hal yang kompleks. Karena itu penulis memandang bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sudah dipahami secara teori namun untuk melaksanakannya dilapangan masih sangat kompleks karena membutuhkan Sumber Daya Manusia yang benar-benar memahami cara kerja SAP itu sendiri. Hal itu berangkat dari pemahaman SDM terhadap peraturan pemerintah yang lama saja belum stabil, terlebih ketika ingin diterapkannya peraturan pemerintah yang baru dengan laporan keuangan yang harus disajikan menjadi bertambah. dalam tambahan pembelajaran mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, istilah seperti “beban” baru dikenal setelah berlakunya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (PP 71/2010) yang disajikan pada laporan operasional dan dibedakan dengan “belanja” yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan DIPA DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pelaporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi bertambah kuantitasnya hingga dua pelaporan yaitu pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Pelaporan finansial (*financial reports*) yang terdiri dari: neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Namun, bagi para pengelola keuangan DIPA DITJEN Bimas Kristen kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71/2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut

dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda.

4.2 Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada DIPA DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende

Implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di DIPA DITJEN Bimas Kristen dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual melalui tahap sebagai berikut : Tahun 2010 dilakukan dengan 3 cara yaitu Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual, Menyiap dan menetapkan SAP berbasis akrual, dan Menyiapkan rencana implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan tahun 2011 dilakukan dengan dua cara yaitu Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual dan Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Kemudian pada tahun 2012 kembali dengan menggunakan 3 cara yaitu Mengembangkan sistem akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh stakeholders yang terlibat, dan Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan, Sedangkan tahun 2013 menggunakan 2 cara yaitu Melakukan uji coba Implementasi konsolidasi laporan keuangan, penyempurnaan sistem dan capacity building dan penyusunan peraturan yang berkaitan. tahun 2014 kembali menggunakan 3 cara yaitu Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam laporan keuangan, tetapi Laporan keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA, Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan berbasis akrual, dan Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan. kemudian tahun 2015 mulai menggunakan Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di indonesia. Laporan Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.

4.3 Kesiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual DIPA DITJEN BIMAS Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende

Dalam rangka mendukung penerapan model manajemen keuangan baru berbasis akrual, diperlukan strategi dan persiapan yang terintegrasi dan efektif untuk mendukung keberhasilan proses migrasi menuju penerapan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual.

adapun persiapan yang perlu dilakukan oleh DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende sebagai berikut :

I. Training SDM

Training kepada stakeholders diperlukan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. berdasarkan peta pemangku kepentingan, maka training kesiapan implementasi basis akrual dibagi ke dalam 3 level, yaitu Level penentu komitmen dan politis, level manajerial dan level teknis. secara umum, melalui program integrasi sosialisasi/training ini diharapkan semua pemangku kepentingan memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada laporan keuangan, namun pada DIPA DITJEN Bimas Kristen yang dilakukan masih sangat minim sehingga pemahaman staf tentang SAP itu sendiri masih sangat rendah.

II. Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual penuh. persiapan dibidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi. bagi staf keuangan DIPA itu sendiri belum menguasai secara utuh penggunaan Teknologi Informasi sehingga dapat menimbulkan berbagai kendala dalam membuat laporan keuangan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan DIPA DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, namun masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sering mengabaikan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sesuai dengan syarat yang berlaku dalam menyusun sebuah laporan keuangan.

Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya *training* atau pelatihan berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut dan DITJEN Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan dibutuhkan pelatihan yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman SAP berbasis akrual.

5.2 Saran

Perlu adanya pelatihan atau training yang berkelanjutan berkaitan dengan SAP berbasis akrual agar tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan SAP berbasis akrual sehingga akan menjawab kendala yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. 2008. *Basis Akuntansi Pemerintahan*. (Online), (<http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/>). [November 2012]
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Bodnar, George H, and William S. Hopwood. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku I. Jakarta: Penerbit salemba empat
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. *Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure*
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kieso, Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Management" *Civil Engineering Departement Dipononegoro University*.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. (Online), artikel 1, No.4, (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm). [November 2012].

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIPADITJEN BIMAS KRISTEN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDED - YOHANA AUDIVISTA LOMI,
YULITA LONDA, SABRA B. WAHAB THALIB**

*Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akrua Dengan
SAIBA: 2014:29-37*

Muchtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori danPraktek
Aplikasi Bisnis.Edisi ke-1*. Andi Offset, Yogyakarta

Mulyana, Budi, *Penggunaan Akuntansi Akrua di Negara-Negara Lain; Tren di
Negara-Negara Anggota OECD*

Noerdiawan, Iswahyudi, Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrua*.

*Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri*. 2010. Kesiapan Pemerintah
Daerah Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrua Penuh Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.Jakarta

Ranupandjojo, Heidirachman. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :
Universitas Terbuka

Robert J. Kodoatie, 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Jakarta: PT. Erlangga

Saleh, Z& Pendlebury M.W. 2002. *Accruals Accounting in Government - Developments
in Malaysia*. Asia Pacific Business Review, 12 (4): 421-435.

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III*. Jakarta
:Indonesia, Salemba Empat Simanjuntak, Binsar. tanpa tahun. Menyongsong
Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
(<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art.7pdf>). [November 2012].

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tanjung,Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis
Akrua;Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.

Tickell,Geoffrey. 2010. *Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma*.
International Business & Economics research Journal, 9 (11): 71-78.

Tikk, Juta. 2010. *Accounting Changes In The Public Sector In Estonia*. Business:
Theory and Practice, 11 (1): 77-85.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIPA DITJEN BIMAS KRISTEN PADA
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN ENDED - YOHANA AUDIVISTA LOMI,
YULITA LONDA, SABRA B. WAHAB THALIB**

Widjajarso, Bambang. 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah
Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan* (www.wikipedia.org) diunduh tanggal
12 Januari 2013